

ABSTRAK

Savero Raihan: “Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi)”

Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu implementasi dari hak konstitusional ini, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah di Kota Bekasi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Bekasi, (2) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, dan (3) memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis bagaimana Peraturan Daerah ini diterapkan dalam praktik dan mengkaji implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur terkait.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Hukum yang menyatakan bahwa implementasi adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan tertentu, dengan faktor-faktor kunci seperti komunikasi, sumber daya, dan sikap implementor yang baik. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Teori Otonomi Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diberlakukan, implementasinya di SMA Kota Bekasi masih menghadapi berbagai kendala. Pelanggaran terhadap peraturan ini meningkat setiap tahun, terutama setelah pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan, dengan siswa, guru, dan pengunjung merokok di area sekolah serta kurangnya tanda larangan merokok. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Peran aktif pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Implementasi Kebijakan, Lingkungan Pendidikan, Kota Bekasi